



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /PMK.07/2016

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

ay
F

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk:
 - a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

ay

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD+DAU+DBH+Otsus+Transfer Prov+LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

Keterangan:

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

Otsus = Dana Otonomi Khusus

Transfer Prov = Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota (bernilai positif untuk Kabupaten/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BP = Belanja Pegawai

- (2) Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKF = \frac{KF}{(\sum KF)/n}$$

Keterangan:

IKF = Indeks Kapasitas Fiskal suatu Daerah

KF = Kapasitas Fiskal suatu Daerah

ay
x

n = Jumlah provinsi sebanyak 34 dan kabupaten/kota sebanyak 508

- (3) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014.
- (4) Data penduduk miskin untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur berasal dari data Badan Pusat Statistik tahun 2014 pada Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan jumlah data penduduk miskin pada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi pemerintah.
- (6) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi.
- (7) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:
 - a. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks 2) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
 - b. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari

- 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
- c. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
- d. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} < 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

- (1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi kabupaten/kota pemekaran yang belum tersedia data penduduk miskinnya, maka kategori Kapasitas Fiskalnya mengikuti daerah induk.
- (2) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah yang tidak menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 atau daerah yang telah menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 namun tidak disertai rincian informasi yang diperlukan untuk penghitungan Kapasitas Fiskal adalah sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ay
f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /PMK.07/2016
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
1	Provinsi Aceh	1,70	tinggi
2	Provinsi Sumatera Utara	0,31	rendah
3	Provinsi Sumatera Barat	0,55	sedang
4	Provinsi Riau	0,98	sedang
5	Provinsi Jambi	0,62	sedang
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,39	rendah
7	Provinsi Bengkulu	0,31	rendah
8	Provinsi Lampung	0,23	rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	6,36	sangat tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,30	rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,18	rendah
12	Provinsi DI Yogyakarta	0,40	rendah
13	Provinsi Jawa Timur	0,24	rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,56	sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,17	tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	1,25	tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,44	sangat tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,63	sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,34	rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,35	rendah
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,38	rendah
22	Provinsi Bali	1,27	tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,18	rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,16	rendah
25	Provinsi Maluku	0,34	rendah

ay
f

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
26	Provinsi Papua	1,61	tinggi
27	Provinsi Maluku Utara	1,01	tinggi
28	Provinsi Banten	0,60	sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	1,40	tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,34	rendah
31	Provinsi Kepulauan Riau	1,47	tinggi
32	Provinsi Papua Barat	2,99	sangat tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,49	rendah
34	Provinsi Kalimantan Utara	1,45	tinggi

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /PMK.07/2016
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
1	Kab. Aceh Barat	0,40	rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,29	rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,57	sedang
4	Kab. Aceh Singkil	0,61	sedang
5	Kab. Aceh Tengah	0,57	sedang
6	Kab. Aceh Tenggara	0,55	sedang
7	Kab. Aceh Timur	0,36	rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,29	rendah
9	Kab. Bireuen	0,26	rendah
10	Kab. Pidie	0,23	rendah
11	Kab. Simeulue	0,67	sedang
12	Kota Banda Aceh	0,97	sedang
13	Kota Sabang	1,70	tinggi
14	Kota Langsa	0,61	sedang
15	Kota Lhokseumawe	0,72	sedang
16	Kab. Gayo Lues	0,98	sedang
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,54	sedang
18	Kab. Aceh Jaya	0,93	sedang
19	Kab. Nagan Raya	0,54	sedang
20	Kab. Aceh Tamiang	0,46	rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,48	rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,39	rendah
23	Kota Subulussalam	0,75	sedang
24	Kab. Asahan	0,40	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
25	Kab. Dairi	0,45	rendah
26	Kab. Deli Serdang	0,51	sedang
27	Kab. Karo	0,43	rendah
28	Kab. LabuhanBatu	0,44	rendah
29	Kab. Langkat	0,24	rendah
30	Kab. Mandailing Natal	0,43	rendah
31	Kab. Nias	0,40	rendah
32	Kab. Simalungun	0,26	rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,55	sedang
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,23	rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,41	rendah
36	Kab. Toba Samosir	0,75	sedang
37	Kota Binjai	0,76	sedang
38	Kota Medan	0,51	sedang
39	Kota Pematang Siantar	0,46	rendah
40	Kota Sibolga	0,82	sedang
41	Kota Tanjung Balai	0,49	rendah
42	Kota Tebing Tinggi	0,72	sedang
43	Kota Padang Sidempuan	0,58	sedang
44	Kab. Pakpak Bharat	2,06	sangat tinggi
45	Kab. Nias Selatan	0,21	rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,74	sedang
47	Kab. Serdang Bedagai	0,33	rendah
48	Kab. Samosir	0,71	sedang
49	Kab. Batu Bara	0,35	rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,49	rendah
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,49	rendah
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,38	rendah
53	Kab. Labuhanbatu Utara	0,38	rendah
54	Kab. Nias Utara	0,26	rendah
55	Kab. Nias Barat	0,32	rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,27	rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,50	rendah
58	Kab. Agam	0,46	rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1,18	tinggi
60	Kab. Padang Pariaman	0,41	rendah
61	Kab. Pasaman	0,74	sedang
62	Kab. Pesisir Selatan	0,49	rendah
63	Kab. Sijunjung	0,72	sedang
64	Kab. Solok	0,42	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
65	Kab. Tanah Datar	0,70	sedang
66	Kota Bukit Tinggi	1,54	tinggi
67	Kota Padang Panjang	2,95	sangat tinggi
68	Kota Padang	0,78	sedang
69	Kota Payakumbuh	1,01	tinggi
70	Kota Sawahlunto	6,60	sangat tinggi
71	Kota Solok	3,45	sangat tinggi
72	Kota Pariaman	2,46	sangat tinggi
73	Kab. Pasaman Barat	0,55	sedang
74	Kab. Dharmasraya	0,81	sedang
75	Kab. Solok Selatan	1,05	tinggi
76	Kab. Bengkalis	3,06	sangat tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	0,83	sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	1,31	tinggi
79	Kab. Kampar	0,87	sedang
80	Kab. Kuantan Singingi	0,93	sedang
81	Kab. Pelalawan	0,90	sedang
82	Kab. Rokan Hilir	1,43	tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	0,61	sedang
84	Kab. Siak	3,47	sangat tinggi
85	Kota Dumai	1,93	tinggi
86	Kota Pekanbaru	1,78	tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,53	sedang
88	Kab. Batanghari	0,70	sedang
89	Kab. Bungo	1,07	tinggi
90	Kab. Kerinci	0,93	sedang
91	Kab. Merangin	0,57	sedang
92	Kab. Muaro Jambi	1,12	tinggi
93	Kab. Sarolangun	0,66	sedang
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,70	sedang
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,85	sedang
96	Kab. Tebo	0,86	sedang
97	Kota Jambi	0,48	rendah
98	Kota Sungai Penuh	4,30	sangat tinggi
99	Kab. Lahat	0,44	rendah
100	Kab. Musi Banyuasin	0,85	sedang
101	Kab. Musi Rawas	0,23	rendah
102	Kab. Muara Enim	0,41	rendah
103	Kab. Ogan Komering Ilir	0,28	rendah
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,60	sedang

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
105	Kota Palembang	0,29	rendah
106	Kota Prabumulih	1,06	tinggi
107	Kota Pagar Alam	1,62	tinggi
108	Kota Lubuk Linggau	0,69	sedang
109	Kab. Banyuasin	0,45	rendah
110	Kab. Ogan Ilir	0,24	rendah
111	Kab. OKU Timur	0,35	rendah
112	Kab. OKU Selatan	0,50	sedang
113	Kab. Empat Lawang	0,65	sedang
114	Kab. Bengkulu Selatan	0,29	rendah
115	Kab. Bengkulu Utara	0,31	rendah
116	Kab. Rejang Lebong	0,27	rendah
117	Kota Bengkulu	0,21	rendah
118	Kab. Kaur	0,39	rendah
119	Kab. Seluma	0,28	rendah
120	Kab. Mukomuko	0,55	sedang
121	Kab. Lebong	0,73	sedang
122	Kab. Kepahiang	0,54	sedang
123	Kab. Bengkulu Tengah	1,18	tinggi
124	Kab. Lampung Barat	0,17	rendah
125	Kab. Lampung Selatan	0,13	rendah
126	Kab. Lampung Tengah	0,16	rendah
127	Kab. Lampung Utara	0,13	rendah
128	Kab. Lampung Timur	0,16	rendah
129	Kab. Tanggamus	0,20	rendah
130	Kab. Tulang Bawang	0,45	rendah
131	Kab. Way Kanan	0,25	rendah
132	Kota Bandar Lampung	0,32	rendah
133	Kota Metro	0,79	sedang
134	Kab. Pesawaran	0,21	rendah
135	Kab. Pringsewu	0,34	rendah
136	Kab. Mesuji	1,08	tinggi
137	Kab. Tulang Bawang Barat	0,72	sedang
138	Kab. Bandung	0,30	rendah
139	Kab. Bekasi	0,75	sedang
140	Kab. Bogor	0,31	rendah
141	Kab. Ciamis	0,21	rendah
142	Kab. Cianjur	0,20	rendah
143	Kab. Cirebon	0,17	rendah
144	Kab. Garut	0,16	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
145	Kab. Indramayu	0,22	rendah
146	Kab. Karawang	0,31	rendah
147	Kab. Kuningan	0,20	rendah
148	Kab. Majalengka	0,22	rendah
149	Kab. Purwakarta	0,39	rendah
150	Kab. Subang	0,17	rendah
151	Kab. Sukabumi	0,28	rendah
152	Kab. Sumedang	0,26	rendah
153	Kab. Tasikmalaya	0,23	rendah
154	Kota Bandung	1,13	tinggi
155	Kota Bekasi	0,68	sedang
156	Kota Bogor	0,50	sedang
157	Kota Cirebon	0,84	sedang
158	Kota Depok	1,35	tinggi
159	Kota Sukabumi	0,86	sedang
160	Kota Tasikmalaya	0,28	rendah
161	Kota Cimahi	0,71	sedang
162	Kota Banjar	1,05	tinggi
163	Kab. Bandung Barat	0,21	rendah
164	Kab. Banjarnegara	0,15	rendah
165	Kab. Banyumas	0,14	rendah
166	Kab. Batang	0,25	rendah
167	Kab. Blora	0,22	rendah
168	Kab. Boyolali	0,24	rendah
169	Kab. Brebes	0,11	rendah
170	Kab. Cilacap	0,19	rendah
171	Kab. Demak	0,22	rendah
172	Kab. Grobogan	0,17	rendah
173	Kab. Jepara	0,33	rendah
174	Kab. Karanganyar	0,26	rendah
175	Kab. Kebumen	0,14	rendah
176	Kab. Kendal	0,27	rendah
177	Kab. Klaten	0,18	rendah
178	Kab. Kudus	0,54	sedang
179	Kab. Magelang	0,13	rendah
180	Kab. Pati	0,25	rendah
181	Kab. Pekalongan	0,23	rendah
182	Kab. Pemasang	0,12	rendah
183	Kab. Purbalingga	0,13	rendah
184	Kab. Purworejo	0,21	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
185	Kab. Rembang	0,21	rendah
186	Kab. Semarang	0,37	rendah
187	Kab. Sragen	0,28	rendah
188	Kab. Sukoharjo	0,34	rendah
189	Kab. Tegal	0,24	rendah
190	Kab. Temanggung	0,26	rendah
191	Kab. Wonogiri	0,20	rendah
192	Kab. Wonosobo	0,15	rendah
193	Kota Magelang	1,33	tinggi
194	Kota Pekalongan	0,70	sedang
195	Kota Salatiga	1,37	tinggi
196	Kota Semarang	1,02	tinggi
197	Kota Surakarta	0,53	sedang
198	Kota Tegal	0,80	sedang
199	Kab. Bantul	0,21	rendah
200	Kab. Gunung Kidul	0,14	rendah
201	Kab. Kulon Progo	0,21	rendah
202	Kab. Sleman	0,39	rendah
203	Kota Yogyakarta	0,88	sedang
204	Kab. Bangkalan	0,13	rendah
205	Kab. Banyuwangi	0,36	rendah
206	Kab. Blitar	0,32	rendah
207	Kab. Bojonegoro	0,31	rendah
208	Kab. Bondowoso	0,31	rendah
209	Kab. Gresik	0,33	rendah
210	Kab. Jember	0,21	rendah
211	Kab. Jombang	0,31	rendah
212	Kab. Kediri	0,21	rendah
213	Kab. Lamongan	0,22	rendah
214	Kab. Lumajang	0,25	rendah
215	Kab. Madiun	0,30	rendah
216	Kab. Magetan	0,34	rendah
217	Kab. Malang	0,22	rendah
218	Kab. Mojokerto	0,37	rendah
219	Kab. Nganjuk	0,25	rendah
220	Kab. Ngawi	0,24	rendah
221	Kab. Pacitan	0,25	rendah
222	Kab. Pamekasan	0,21	rendah
223	Kab. Pasuruan	0,28	rendah
224	Kab. Ponorogo	0,28	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
225	Kab. Probolinggo	0,15	rendah
226	Kab. Sampang	0,12	rendah
227	Kab. Sidoarjo	0,64	sedang
228	Kab. Situbondo	0,26	rendah
229	Kab. Sumenep	0,13	rendah
230	Kab. Trenggalek	0,30	rendah
231	Kab. Tuban	0,20	rendah
232	Kab. Tulungagung	0,43	rendah
233	Kota Blitar	1,72	tinggi
234	Kota Kediri	1,22	tinggi
235	Kota Madiun	2,34	sangat tinggi
236	Kota Malang	0,97	sedang
237	Kota Mojokerto	2,28	sangat tinggi
238	Kota Pasuruan	1,04	tinggi
239	Kota Probolinggo	1,00	tinggi
240	Kota Surabaya	1,09	tinggi
241	Kota Batu	1,92	tinggi
242	Kab. Bengkayang	0,82	sedang
243	Kab. Landak	0,43	rendah
244	Kab. Kapuas Hulu	1,18	tinggi
245	Kab. Ketapang	0,62	sedang
246	Kab. Mempawah	0,91	sedang
247	Kab. Sambas	0,39	rendah
248	Kab. Sanggau	1,06	tinggi
249	Kab. Sintang	0,71	sedang
250	Kota Pontianak	1,00	tinggi
251	Kota Singkawang	1,08	tinggi
252	Kab. Sekadau	1,17	tinggi
253	Kab. Melawi	0,64	sedang
254	Kab. Kayong Utara	1,17	tinggi
255	Kab. Kubu Raya	0,70	sedang
256	Kab. Barito Selatan	1,90	tinggi
257	Kab. Barito Utara	2,64	sangat tinggi
258	Kab. Kapuas	1,10	tinggi
259	Kab. Kotawaringin Barat	1,71	tinggi
260	Kab. Kotawaringin Timur	1,21	tinggi
261	Kota Palangkaraya	1,75	tinggi
262	Kab. Katingan	2,08	sangat tinggi
263	Kab. Seruyan	1,50	tinggi
264	Kab. Sukamara	6,53	sangat tinggi

ay

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
265	Kab. Lamandau	4,49	sangat tinggi
266	Kab. Gunung Mas	2,15	sangat tinggi
267	Kab. Pulang Pisau	2,25	sangat tinggi
268	Kab. Murung Raya	3,75	sangat tinggi
269	Kab. Barito Timur	1,66	tinggi
270	Kab. Banjar	1,58	tinggi
271	Kab. Barito Kuala	1,31	tinggi
272	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,19	tinggi
273	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,16	tinggi
274	Kab. Hulu Sungai Utara	1,24	tinggi
275	Kab. Kotabaru	2,42	sangat tinggi
276	Kab. Tabalong	1,61	tinggi
277	Kab. Tanah Laut	2,10	sangat tinggi
278	Kab. Tapin	3,53	sangat tinggi
279	Kota Banjarbaru	2,04	sangat tinggi
280	Kota Banjarmasin	1,17	tinggi
281	Kab. Balangan	2,48	sangat tinggi
282	Kab. Tanah Bumbu	1,84	tinggi
283	Kab. Berau	7,57	sangat tinggi
284	Kab. Kutai Kartanegara	3,68	sangat tinggi
285	Kab. Kutai Barat	3,58	sangat tinggi
286	Kab. Kutai Timur	3,89	sangat tinggi
287	Kab. Paser	3,34	sangat tinggi
288	Kota Balikpapan	4,80	sangat tinggi
289	Kota Bontang	5,64	sangat tinggi
290	Kota Samarinda	1,72	tinggi
291	Kab. Penajam Paser Utara	3,15	sangat tinggi
292	Kab. Bolaang Mongondow	0,53	sedang
293	Kab. Minahasa	0,48	rendah
294	Kab. Sangihe	0,57	sedang
295	Kota Bitung	1,04	tinggi
296	Kota Manado	1,17	tinggi
297	Kab. Kepulauan Talaud	1,10	tinggi
298	Kab. Minahasa Selatan	0,50	sedang
299	Kota Tomohon	1,41	tinggi
300	Kab. Minahasa Utara	0,74	sedang
301	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,19	tinggi
302	Kota Kotamobagu	1,21	tinggi
303	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,26	tinggi

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
304	Kab. Minahasa Tenggara	0,72	sedang
305	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,89	tinggi
306	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,88	sedang
307	Kab. Banggai	0,65	sedang
308	Kab. Banggai Kepulauan	0,30	rendah
309	Kab. Buol	0,52	sedang
310	Kab. Toli-Toli	0,42	rendah
311	Kab. Donggala	0,32	rendah
312	Kab. Morowali	0,22	rendah
313	Kab. Poso	0,41	rendah
314	Kota Palu	0,82	sedang
315	Kab. Parigi Moutong	0,23	rendah
316	Kab. Tojo Una Una	0,51	sedang
317	Kab. Sigi	0,45	rendah
318	Kab. Bantaeng	0,66	sedang
319	Kab. Barru	0,73	sedang
320	Kab. Bone	0,31	rendah
321	Kab. Bulukumba	0,52	sedang
322	Kab. Enrekang	0,46	rendah
323	Kab. Gowa	0,38	rendah
324	Kab. Jeneponto	0,25	rendah
325	Kab. Luwu	0,37	rendah
326	Kab. Luwu Utara	0,41	rendah
327	Kab. Maros	0,48	rendah
328	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0,32	rendah
329	Kota Palopo	0,81	sedang
330	Kab. Luwu Timur	1,43	tinggi
331	Kab. Pinrang	0,60	sedang
332	Kab. Sinjai	0,58	sedang
333	Kab. Kepulauan Selayar	0,68	sedang
334	Kab. Sidenreng Rappang	0,75	sedang
335	Kab. Soppeng	0,63	sedang
336	Kab. Takalar	0,52	sedang
337	Kab. Tana Toraja	0,42	rendah
338	Kab. Wajo	0,70	sedang
339	Kota Pare-pare	1,86	tinggi
340	Kota Makassar	0,93	sedang
341	Kab. Toraja Utara	0,37	rendah

ay
7

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
342	Kab. Buton	0,34	rendah
343	Kab. Konawe	0,28	rendah
344	Kab. Kolaka	0,23	rendah
345	Kab. Muna	0,30	rendah
346	Kota Kendari	0,97	sedang
347	Kota Bau-bau	0,82	sedang
348	Kab. Konawe Selatan	0,46	rendah
349	Kab. Bombana	0,61	sedang
350	Kab. Wakatobi	0,64	sedang
351	Kab. Kolaka Utara	0,58	sedang
352	Kab. Konawe Utara	2,44	sangat tinggi
353	Kab. Buton Utara	1,22	tinggi
354	Kab. Muna Barat	0,30	rendah
355	Kab. Buton Tengah	0,34	rendah
356	Kab. Buton Selatan	0,34	rendah
357	Kab. Badung	6,41	sangat tinggi
358	Kab. Bangli	1,23	tinggi
359	Kab. Buleleng	0,63	sedang
360	Kab. Gianyar	1,20	tinggi
361	Kab. Jembrana	1,21	tinggi
362	Kab. Karangasem	0,81	sedang
363	Kab. Klungkung	1,38	tinggi
364	Kab. Tabanan	1,05	tinggi
365	Kota Denpasar	2,18	sangat tinggi
366	Kab. Bima	0,21	rendah
367	Kab. Dompu	0,33	rendah
368	Kab. Lombok Barat	0,17	rendah
369	Kab. Lombok Tengah	0,15	rendah
370	Kab. Lombok Timur	0,11	rendah
371	Kab. Sumbawa	0,27	rendah
372	Kota Mataram	0,44	rendah
373	Kota Bima	0,59	sedang
374	Kab. Sumbawa Barat	0,66	sedang
375	Kab. Lombok Utara	0,17	rendah
376	Kab. Alor	0,26	rendah
377	Kab. Belu	0,11	rendah
378	Kab. Ende	0,21	rendah
379	Kab. Flores Timur	0,54	sedang
380	Kab. Kupang	0,18	rendah
381	Kab. Lembata	0,30	rendah

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
382	Kab. Manggarai	0,19	rendah
383	Kab. Ngada	0,57	sedang
384	Kab. Sikka	0,34	rendah
385	Kab. Sumba Barat	0,26	rendah
386	Kab. Sumba Timur	0,19	rendah
387	Kab. Timor Tengah Selatan	0,11	rendah
388	Kab. Timor Tengah Utara	0,18	rendah
389	Kota Kupang	0,41	rendah
390	Kab. Rote Ndao	0,21	rendah
391	Kab. Manggarai Barat	0,30	rendah
392	Kab. Nagekeo	0,52	sedang
393	Kab. Sumba Barat Daya	0,13	rendah
394	Kab. Sumba Tengah	0,39	rendah
395	Kab. Manggarai Timur	0,15	rendah
396	Kab. Sabu Raijua	0,40	rendah
397	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,38	rendah
398	Kab. Maluku Tengah	0,18	rendah
399	Kab. Maluku Tenggara	0,39	rendah
400	Kab. Buru	0,42	rendah
401	Kota Ambon	0,83	sedang
402	Kab. Seram Bagian Barat	0,26	rendah
403	Kab. Seram Bagian Timur	0,54	sedang
404	Kab. Kepulauan Aru	0,52	sedang
405	Kota Tual	0,58	sedang
406	Kab. Maluku Barat Daya	0,69	sedang
407	Kab. Buru Selatan	1,12	tinggi
408	Kab. Biak Numfor	0,44	rendah
409	Kab. Jayapura	1,29	tinggi
410	Kab. Jayawijaya	0,30	rendah
411	Kab. Merauke	1,99	tinggi
412	Kab. Mimika	1,39	tinggi
413	Kab. Nabire	0,68	sedang
414	Kab. Paniai	0,28	rendah
415	Kab. Puncak Jaya	0,59	sedang
416	Kab. Kepulauan Yapen	0,72	sedang
417	Kota Jayapura	0,77	sedang
418	Kab. Sarmi	5,04	sangat tinggi
419	Kab. Keerom	1,80	tinggi
420	Kab. Yahukimo	0,30	rendah
421	Kab. Pegunungan Bintang	1,18	tinggi

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
422	Kab. Tolikara	0,55	sedang
423	Kab. Boven Digoel	2,71	sangat tinggi
424	Kab. Mappi	1,14	tinggi
425	Kab. Asmat	1,15	tinggi
426	Kab. Waropen	2,00	tinggi
427	Kab. Supiori	2,85	sangat tinggi
428	Kab. Mamberamo Raya	4,39	sangat tinggi
429	Kab. Mamberamo Tengah	1,47	tinggi
430	Kab. Yalimo	1,06	tinggi
431	Kab. Lanny Jaya	0,39	rendah
432	Kab. Nduga	0,55	sedang
433	Kab. Dogiyai	0,69	sedang
434	Kab. Puncak	0,76	sedang
435	Kab. Intan Jaya	1,47	tinggi
436	Kab. Deiyai	0,56	sedang
437	Kab. Halmahera Tengah	1,50	tinggi
438	Kota Ternate	1,73	tinggi
439	Kab. Halmahera Barat	0,84	sedang
440	Kab. Halmahera Timur	1,00	sedang
441	Kab. Halmahera Selatan	1,01	tinggi
442	Kab. Halmahera Utara	1,44	tinggi
443	Kab. Kepulauan Sula	0,69	sedang
444	Kota Tidore Kepulauan	2,19	sangat tinggi
445	Kab. Pulau Morotai	1,77	tinggi
446	Kab. Lebak	0,29	rendah
447	Kab. Pandeglang	0,22	rendah
448	Kab. Serang	0,59	sedang
449	Kab. Tangerang	0,62	sedang
450	Kota Cilegon	2,18	sangat tinggi
451	Kota Tangerang	0,89	sedang
452	Kota Serang	0,59	sedang
453	Kota Tangerang Selatan	9,19	sangat tinggi
454	Kab. Bangka	1,15	tinggi
455	Kab. Belitung	1,28	tinggi
456	Kota Pangkal Pinang	1,89	tinggi
457	Kab. Bangka Selatan	1,88	tinggi
458	Kab. Bangka Tengah	1,62	tinggi
459	Kab. Bangka Barat	2,57	sangat tinggi
460	Kab. Belitung Timur	1,85	tinggi
461	Kab. Boalemo	0,30	rendah

27

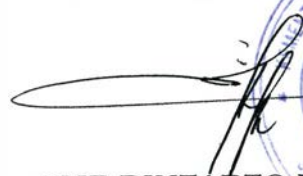

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
462	Kab. Gorontalo	0,17	rendah
463	Kota Gorontalo	1,11	tinggi
464	Kab. Pohuwato	0,38	rendah
465	Kab. Bone Bolango	0,38	rendah
466	Kab. Gorontalo Utara	0,40	rendah
467	Kab. Natuna	9,33	sangat tinggi
468	Kab. Kepulauan Anambas	10,59	sangat tinggi
469	Kab. Karimun	1,39	tinggi
470	Kota Batam	0,75	sedang
471	Kota Tanjung Pinang	0,85	sedang
472	Kab. Lingga	1,20	tinggi
473	Kab. Bintan	2,02	sangat tinggi
474	Kab. Fakfak	1,11	tinggi
475	Kab. Manokwari	0,30	rendah
476	Kab. Sorong	1,13	tinggi
477	Kota Sorong	0,52	sedang
478	Kab. Raja Ampat	2,66	sangat tinggi
479	Kab. Sorong Selatan	2,11	sangat tinggi
480	Kab. Teluk Bintuni	1,98	tinggi
481	Kab. Teluk Wondama	1,47	tinggi
482	Kab. Kaimana	2,70	sangat tinggi
483	Kab. Maybrat	1,41	tinggi
484	Kab. Tambrau	4,24	sangat tinggi
485	Kab. Majene	0,38	rendah
486	Kab. Mamuju	0,40	rendah
487	Kab. Polewali Mandar	0,20	rendah
488	Kab. Mamasa	0,47	rendah
489	Kab. Mamuju Utara	1,49	tinggi
490	Kab. Bulungan	3,08	sangat tinggi
491	Kab. Malinau	7,03	sangat tinggi
492	Kab. Nunukan	2,81	sangat tinggi
493	Kota Tarakan	2,22	sangat tinggi
494	Kab. Tana Tidung	19,55	sangat tinggi
495	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,41	rendah
496	Kab. Musi Rawas Utara	0,23	rendah
497	Kab. Pangandaran	0,21	rendah
498	Kab. Pesisir Barat	0,17	rendah
499	Kab. Malaka	0,11	rendah
500	Kab. Pulau Taliabu	0,69	sedang

ay
f

No.	Nama Daerah	IKF	Kategori
501	Kab. Manokwari Selatan	0,30	rendah
502	Kab. Pegunungan Arfak	0,30	rendah
503	Kab. Mamuju Tengah	0,40	rendah
504	Kab. Mahakam Ulu	3,58	sangat tinggi
505	Kab. Banggai Laut	0,30	rendah
506	Kab. Morowali Utara	0,22	rendah
507	Kab. Konawe Kepulauan	0,28	rendah
508	Kab. Kolaka Timur	0,23	rendah

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

